

MATRIK CASCADING KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ( OPD ) TAHUN 2019  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET (TAHUN 2023)	ESSELON II			KONDISI AWAL	TARGET (TAHUN 2019)	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	FORMULASI/ PENJELASAN	TARGET (TAHUN 2019)	ESSELON IV										
					SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN / FORMULASI							2017		2018	17	18	19	16	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
														2017	2018									
1	Rendahnya kemampuan masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan kemandirian desa	Meningkatkan Sumber Daya Daerah berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun	0,7072 = 101,8368 / 144	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun	Dinas PMD mempunyai tugas memberdayakan masyarakat dalam membangun desa, tingkat kemandirian masyarakat dalam membangun desa dapat diukur melalui Indeks Desa Membangun (IDM). Semakin tinggi IDM sebuah Desa menunjukkan bahwa Desa memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa (PermenDesa, POTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun)	0,5755 = 82,8653 / 144	0,6204 = 89,3340 / 144	0,6377 = 91,8346 / 144	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	Jh LKD Aktif x 100 % Jh seluruh LKD	73,63 % (1.198 / 1.627) x 100 %	Bimbingan teknis pengurus LPM Desa	Jumlah Pengurus LPM yang terampil	40 orang	Rp 31.300.000						
														Bimbingan Teknis RT/RW	Jumlah Pengurus RT/RW yang terampil	40 orang	Rp 8.600.000							
														Penilaian Posyandu	Jumlah Posyandu tk Kec. yang berprestasi dan dinilai Tk. Kab.	11 Posyandu	Rp 47.090.000							
														Penilaian Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Desa yg memiliki budaya gotong royong tinggi yang dinilai	11 Desa	Rp 59.275.000							
														Penilaian Inovasi Teknologi Tepat Guna	Jumlah Inovator TTG yang terseleksi	3 Inovasi	Rp 20.400.000							
														Workshop kemitraan Bumdes	Jumlah BUMDes yang berkembang	40 Kerjasama / MSU	Rp 24.520.000							
														Sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah pemangku kepentingan kawasan perdesaan	60 Orang	Rp 14.430.000							
2	Rendahnya kinerja Pelayanan pemerintahan desa	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Persentase Pemerintah Desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	38,88% (56/144) x 100%	Meningkatnya penguasaan sistem informasi daerah yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	Persentase Pemerintah Desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	dalam rangka mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat perlu penguasaan kemajuan teknologi informasi berupa aplikasi F = (jumlah Desa yg menggunakan aplikasi IT / Jumlah desa se Kab.HSS) x 100 %	0% = (0/144)	0,6% (12/144)	8,33% (12/144)	Program Peningkatan dan Pelayanan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang berkinerja baik	25,69% (37/144) x 100 %	Evaluasi perkembangan desa/kelurahan yang dievaluasi	Jumlah Desa/kelurahan yang dievaluasi	114 Desa dan 4 Kelurahan	Rp 36.300.000							
														Evaluasi perencanaan dan rancangan APBDes	Jumlah Berita Acara Evaluasi APBDes	288 Dokumen	Rp 136.455.000							
														Pelaksanaan e-Monitoring System Desa	Jumlah Desa yang menerapkan e-Monitoring System	22 Desa	Rp 44.370.000							
														Pelatihan dan Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti pelatihan Awal									
3	Perlu ditingkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	23,50 89,06 (A)	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi dilaksanakan pada delapan area perubahan meliputi: kelembagaan, Manajemen perubahan, SOM, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SOM, Penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, penataan kualitas pelayanan publik. Pengukuran IRB dilakukan melalui penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPPRB) yang kemudian dievaluasi oleh Tim KEMENPAN RB.	20,5 74,72 (BB)	21,00 79,41 (BB)	21,5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Pelayanan	82	Penyediaan jasa dan Administrasi Kantor	Pelayanan Administrasi Sesuai Standar	1 tahun	Rp 54.241.600							
														Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik	Pelayanan Administrasi Sesuai Standar	1 tahun	Rp 45.000.000							
														Penyediaan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Pelayanan Administrasi Sesuai Standar	1 tahun	Rp 14.000.000							
														Penyediaan Makanan dan Minuman	Pelayanan Administrasi Sesuai Standar	1 tahun	Rp 25.200.000							
														Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis	Pelayanan Administrasi Sesuai Standar	1 tahun	Rp 44.850.000							
														Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan lapangan	Pelayanan Administrasi Sesuai Standar	1 tahun	Rp 467.675.000							
														Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor kondisi baik	1 tahun	Rp 97.987.000							
														Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Mobil dan Kendaraan operasional Kondisi baik	1 tahun	Rp 38.850.000							
														Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor kondisi baik	1 tahun	Rp 7.100.000							
														Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Pelayanan perangkat daerah sesuai standar	1 tahun	Rp 494.532.400							
														Peningkatan Pelayanan Kinerja Aparatur	Pelayanan perangkat daerah sesuai standar	1 tahun	Rp 87.870.000							
														Penyusunan Dokumen AKIP	Jumlah dokumen laporan AKIP yang memenuhi aspek kualitas	15 Laporan Capaian Kinerja	Rp 4.845.000							
														Penyusunan Dokumen Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang disusun memenuhi aspek kualitas	12 Laporan Keuangan	Rp 4.741.000							

Disusun, Januari 2019  
Dinas PMD,  
Drs. KAMIDI, MIP  
731115 199302 1 002